



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 765/Pdt.P/2024/PN Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. **Abby Alexandro Reymond Bora**, NIK.5371030108880005, Tempat/Tanggal Lahir: Kupang, 01 Agustus 1988, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Pendidikan: SLTA, Status Perkawinan: Kawin, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Jl. Gunung Kelimutu RT 009 RW 003, kelurahan Merdeka, Kecamatan: Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai :Pemohon I;
2. **Peatri Sofia Gresela Dengga**, NIK.537102610930003, Tempat /Tanggal Lahir: Soe, 18 Oktober 1993, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Belum/tidak bekerja., Pendidikan: Diploma III Sederajat, Status Perkawinan: Kawin, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Jl. Gunung Kelimutu RT.009, RW.003, Kelurahan: Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai :Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 765/Pdt.P/2024/PN Kpg., tertanggal 21 November 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 765/Pdt.P/2024/PN Kpg., tertanggal 21 November 2024, tentang Hari Sidang;

Setelah membaca Surat-Surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 Nopember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan No. 765/Pdt.P/2024/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Nopember 2024 dibawah Register No.: 765/Pdt.P/2024/PN Kpg., yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Nopember 2024 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-20112024-0008 tertanggal 20 Nopember 2024
2. Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah dikaruniakan seorang anak yang bernama GRAZHELLIA PAULINA YULIANSE BORAA lahir 21 Juni 2013 berdasarkan akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-08032019-0012 ,
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak tersebut diatas, Para Pemohon haruslah mendapatkan surat Penetapan Pengesahan Anak dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya di persidangan, Para Pemohon menyatakan ada perbaikan yaitu posita ke-3 dan petitum ke-2 "Boraa" menjadi "Bora'a";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ABBY ALEXANDRO REYMAND, NIK. 5371030108880005, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEATRI SOFIA GRESELA DENGGA, NIK. 5371025810930003, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-20112024-0008 tanggal 20 Nopember 2024, diberi tanda P.3;
4. Foto Kopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ABBY ALEXANDRO REYMAND BORA'A No. 5371062702190003, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli kutipan akta kelahiran Nomor : 5371-LT-08032019-0012 atas nama GRAZHELLIA PAULINA YULIANSE BORA'A, pada tanggal 21 Juni 2013, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari kedua Pemohon yang bernama ABBY ALEXANDRO REYMAND BORA'a dengan Defita PEATRI SOFIA GRASELA, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-6 sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan ini para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan No. 765/Pdt.P/2024/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi :

- Bahwa, benar anak dari para Pemohon yang bernama GRAZHELLIA PAULINA YULIANSE BORAA lahir di Kupang tanggal 21 Juni 2013 yang lahir di luar perkawinan yang sah adalah anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa, Kedua orang tua kandung dari anak tersebut adalah para Pemohon sendiri;
- Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Biologis dan ibu biologis dari anak tersebut;
- Bahwa, alasan Para Pemohon membuat Pengesahan Anak di Pengadilan karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan sah orang tuanya, sehingga para Pemohon mengurus Pengesahan Anak di Pengadilan untuk mendapatkan Akta Pengesahan Anak dari Pengadilan;
- Bahwa, benar para Pemohon sekarang sudah menikah sah tanggal 6 November 2024;
- Bahwa, benar Surat Pengakuan Anak tersebut ditandatangani oleh para Pemohon sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Saksi:

- Bahwa, benar anak dari para Pemohon yang bernama GRAZHELLIA PAULINA YULIANSE BORAA lahir di Kupang tanggal 21 Juni 2013 yang lahir di luar perkawinan yang sah adalah anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa, Kedua orang tua kandung dari anak tersebut adalah para Pemohon sendiri;
- Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Biologis dan ibu biologis dari anak tersebut;
- Bahwa, alasan Para Pemohon membuat Pengesahan Anak di Pengadilan karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan sah orang tuanya, sehingga para Pemohon mengurus Pengesahan Anak di Pengadilan untuk mendapatkan Akta Pengesahan Anak dari Pengadilan;
- Bahwa, benar para Pemohon sekarang sudah menikah sah tanggal 6 November 2024;
- Bahwa, benar Surat Pengakuan Anak tersebut ditandatangani oleh para Pemohon sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan No. 765/Pdt.P/2024/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pengesahan anak Para Pemohon yang bernama GRAZHELLIA PAULINA YULIANSE BORAA lahir 21 Juni 2013, yang lahir di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut adalah anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sebagaimana diakui oleh para Pemohon dan sekarang para pemohon menyatakan telah melakukan perkawinan sah, maka harus ada pengesahan anak dari kedua orang tua kandungnya mengenai kebenaran bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing yang telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan permohonan Para pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, (*buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, halaman 43*);

Menimbang, bahwa dari bukti - bukti surat bertanda P-1 dan P-2 maka dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka Pengadilan Negeri Kupang adalah berwenang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang substansi permohonan Para Pemohon sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan No. 765/Pdt.P/2024/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa “setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, karena terkait dengan pengesahan anak oleh para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan dengan meneliti kebenaran asal-usul anak tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon di Persidangan serta dari keterangan para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa asal - usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang ;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau yang dalam hal ini salah satu dari “peristiwa penting lainnya” yang dimaksud adalah pengesahan anak yang harus melalui Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah merevisi Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan No. 765/Pdt.P/2024/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan “alat bukti lain menurut hukum” sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut, apakah benar anak tersebut mempunyai hubungan darah atau hubungan perdata dengan keluarga ayahnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dengan bersumpah di depan persidangan menerangkan bahwa benar para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak tersebut, sebagaimana juga telah tersebut dalam :

1. Fotokopi sesuai asli kutipan akta kelahiran Nomor : 5371-LT-08032019-0012 atas nama GRAZHELLIA PAULINA YULIANSE BORA'A, pada tanggal 21 Juni 2013, diberi tanda P-5;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari kedua Pemohon yang bernama ABBY ALEXANDRO REYMANDBORA'a dengan Defita PEATRI SOFIA GRASELA, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Saksi memberikan keterangan bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah pada tanggal 16 November 2024, sebagaimana bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-20112024-0008 (bukti P-3), sehingga sudah sesuai dengan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon sendiri dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat yaitu Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak (*vide bukti - P-6*), maka Hakim meyakini bahwa benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon yang lahir diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas para Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya serta maksud dari para Pemohon tersebut adalah ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat dan oleh karenanya petitum ke-2 dikabulkan dengan perubahan amar sebagaimana dalam penetapan ini tanpa merubah makna dan tujuan dari padanya;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan No. 765/Pdt.P/2024/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan tersebut, dengan memperhatikan Pasal 56 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka penduduk yang bersangkutan harus melaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan oleh karenanya petitum ke-3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang pada pokoknya memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar mencatat pengesahan ini, Hakim berpendapat hal tersebut sudah merupakan kewajiban hukum yang diatur oleh Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk mencatatkan pengesahan anak sebagaimana penetapan ini, dimana pula kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tidak merupakan pihak dalam permohonan ini yang sifatnya sepihak sehingga tidak dapat diperintahkan untuk melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan penetapan ini, maka tidak beralasan petitum tersebut dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dapat dikabulkan seluruh permohonan para Pemohon, dan oleh karena seluruh permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipertegas serta ditambahkan penulisan amar Permohonan para Pemohon yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Penetapan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya;

Mengingat pasal - pasal dari undang - undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan anak yang bernama Grazhellia Paulina Yulianse Bora'a lahir di Kupang tanggal 21 Juni 2013, adalah anak sah dari Para Pemohon yang lahir diluar Perkawinan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan No. 765/Pdt.P/2024/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak Permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa 10 Desember 2024** oleh kami:

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, ST., SH., MMT., MH., Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dibantu **Roberto De Jesus Da Costa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Roberto De Jesus Da Costa, S.H., M.H.

Dr. I Nyoman Agus H., ST., SH., MMT., MH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,
2. ATK Perdata.....	Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan Para Pemohon.....	Rp.	10.000,
4. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,
5. Biaya Materai.....	Rp.	10.000,

JUMLAH Rp. 110.000,
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)